

Pengurus PHBI Tempirai Raya Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar Sumsel-Pengurus Peringatan Besar Hari Besar Islam (PPHBI) Tempirai Raya sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H di Mushola Baiturrahman, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (29/9/2024) malam.

Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut digelar guna mensyiarkan agama islam di Desa Tempirai Raya (sebutan dari gabungan Desa Tempirai, Desa Tempirai Utara, Desa Tempirai Timur dan Desa Tempirai Selatan).

Ketua Umum PPHBI Tempirai Raya, Sertu Mulyadi Zainuri melalui Ketua 1 H. Aswanto H. Akil, menyampaikan terima kasih kepada para jama'ah dan tamu undangan yang telah menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H.

****Baca Juga:** [Mantan Ketua KPUD Muratara Sumsel Komentari Belum Ada Cakada Memiliki Visi yang Jelas](#)

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan penceramah sekaligus pemuda Desa Tempirai yakni ustadz Deka Armando. Aswanto, mengajak para jama'ah dapat mendengarkan ceramah tersebut.

"Tentunya, ceramah agama ini dapat menambah keilmuan agama kita," ujar Aswanto dalam sambutannya.

Ia mengatakan sejumlah agenda yang telah dilakukan oleh jajaran pengurus PPHBI, sejak dibentuk.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa Tempirai Selatan, Sapikal Usman dan Kepala Desa Tempirai Timur, M. Teguh Jaya.

Kepala Desa Tempirai Timur, M. Teguh Jaya, didampingi oleh Kepala Desa Tempirai Selatan, Sapikal Usman menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pengurus PHBI yang telah menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Ini bagian upaya kita mensyiarkan agama Islam di Desa Tempirai Raya. Tentunya kami memberikan apresiasinya kepada jajaran pengurus PHBI yang telah menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW," ujarnya. (Oke)

Dirjen Imigrasi : Risiko Kerja Tinggi Dasari Aturan Penggunaan Senjata Api bagi

Petugas Imigrasi

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan memuat peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum.

Peraturan tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

“Sudah terjadi peristiwa tragis di mana petugas Imigrasi gugur saat menjalankan tugas. Pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. Dia (orang asing) ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Minggu, (29/9/2024).

**Baca Juga: [Dosen Kesmas UNMA Banten Edukasi dan Teliti Pengetahuan HIV/AIDS pada Remaja di Panimbang](#)

Risiko kerja yang tinggi juga mengintai petugas imigrasi yang menjaga perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas seringkali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya, sehingga penggunaan senjata api dibutuhkan sebagai perlindungan diri dan memastikan petugas dapat menangkap pelaku.

Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menimbulkan efek gentar bagi orang asing yang hendak mencoba melawan petugas.

Tahun 2024, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum kinerjanya semakin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September meningkat 124%, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Selama Januari-September 2024 tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia. Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar kepada petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum.

“Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju. Seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia dan Malaysia. Petugas imigrasi di negara-negara ini diizinkan pakai senjata api, tentunya dengan aturan yang sangat ketat,” katanya.

Silmy mengatakan, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif.

“Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria yang ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api, serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan (penggunaan

senjata api) karena masih menunggu aturan turunannya,” tegas Dirjen Imigrasi. (Oke)

Dosen Kesmas UNMA Banten Edukasi dan Teliti Pengetahuan HIV/AIDS pada Remaja di Panimbang

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Dosen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dari Universitas Mathla'ul Anwar Banten melakukan penelitian kepada remaja di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang soal HIV/ AIDS.

Penelitian tersebut bekerjasama dengan Kemdikbud Ristek melalui program Penelitian Dosen Pemula (PDP) selama bulan Agustus – September 2024.

Sebanyak 378 remaja usia 12 – 16 tahun yang tersebar di enam desa Kecamatan Panimbang terlibat dalam penelitian yang berjudul 'Efektifitas Penyuluhan HIV/AIDS dengan Media Leaflet

dan Media Video Tiktok pada Remaja di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

****Baca Juga:** [Kampanye di Kutabumi: Warga Ingin Irvansyah Tanggulangi Banjir, Pengangguran dan UMKM](#)

Ketua tim penelitian Ega Egriana Handayani mengungkapkan, bahwa kegiatan ini tidak semata hanya penelitian tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS.

Menurutnya, desain studi yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu eksperimental dimana responden diberikan berupa edukasi atau penyuluhan tentang HIV/AIDS.

“Dan dilihat perbedaaan pengetahuannya antara sebelum dan sesudah diberikanr penyuluhan dengan menggunakan media leaflet dan video,” ungkap Ega yang juga dosen Kesmas UNMA Banten, Minggu (29/9/2024).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di wilayah tersebut masih sangat minim pengetahuan tentang penyakit menular akibat aktivitas seksual yang mematikan ini.

“Diketahui banyak remaja yang belum mengetahui apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularan HIV/AIDS dan belum mengetahui bagaimana penanganan HIV/AIDS,” kata Anggota Tim Peneliti Siti Nur Ramdaniati.

Dikatakan Siti, hasil penelitian diketahui media video TikTok lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS dibandingkan media leaflet.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan media sosial sangat pesat termasuk pengguna tiktok,”

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, kasus HIV/AIDS sepanjang tahun 2023 sebanyak 186 kasus baru HIV/AIDS dengan sebaran di beberapa kecamatan di Pandeglang.

Penularan terbanyak disebabkan oleh seks dikalangan LGBT dan seks bebas.

Menurut Siti, aktivitas seksual dikalangan remaja semakin meningkat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS, hal ini sejalan dengan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang menyebutkan sekitar 34 persen remaja wanita dan 21 persen remaja laki-laki yang berusia 15-24 tahun belum pernah mendengar istilah HIV/AIDS.

“Semoga dengan pelaksanaan edukasi dan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan remaja terhadap penularan HIV/AIDS,”pungkasnya. (Aep)

Forum Eks Anggota DPRD Kabupaten Serang Lintas Partai Deklarasi Dukung Ratu Zakiyah-Najib

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Gelombang dukungan terus mengalir kepada calon Bupati Serang nomor urut 2 Ratu Zakiyah-Najib Hamas. Kali ini giliran forum mantan anggota DPRD Kab Serang Lintas Partai menyatakan dukungan secara langsung kepada Ratu Zakiyah.

Forum mantan anggota DPRD berasal dari berbagai partai yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, Hanura, PBB, PAN, PKS, Gerindra.

“Alhamdulillah malam ini saya menerima dukungan dari forum mantan anggota DPRD Kabupaten Serang, dukungan ini sebagai tambahan daya gerak dan juang bagi saya dan pak Najib Hamas,”ucap Ratu Zakiyah, Minggu (29/9/2024).

**Baca Juga: [Kampanye di Kutabumi: Warga Ingin Irvansyah Tanggulangi Banjir, Pengangguran dan UMKM](#)

Lebih lanjut Ratu Zakiyah mengatakan bahwa dukungan yang didapatkannya tersebut merupakan suatu bentuk nyata ingin adanya perubahan di Kabupaten Serang.

“Tentu teman-teman dari forum mantan anggota DPRD ini pasti memiliki pengalaman terutama dalam hal pembangunan di Kabupaten Serang, ini sebagai bekal bagi saya dan Pak Najib dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Serang,”ujarnya.

Selanjutnya para mantan anggota DPRD tersebut mengatakan bahwa kehadiran mereka bertemu dengan Ratu Zakiyah bukan hanya menyatakan dukungan namun akan bergerak ke akar rumput untuk menangkan pasangan Ratu Zakiyah – Najib Hamas.

“Bismillah dengan ini kami menyatakan dukungan kepada Ratu Zakiyah – Najib Hamas, dan kami akan bergerak di masing-masing DAPIL untuk menangkan Ratu Zakiyah – Najib Hamas,”ucap serentak oleh forum mantan anggota DPRD Kab Serang. (Aep)

Kampanye di Kutabumi: Warga Ingin Irvansyah Tanggulangi Banjir, Pengangguran dan UMKM

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Calon bupati Tangerang nomor urut 1, Irvansyah Asmat kampanye di Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis. Ia mendapatkan aspirasi perbaikan infrastruktur publik jika nantinya terpilih di Pilkada 2024.

“Jadi saluran air yang ada di depan rumah kami yang selama ini belum ada itu diadakan,” kata Aji, warga perumahan Kutabumi 3, Minggu (29/9/2024).

Menurutnya, saluran drainase mengalir ke kali dekat Pasar Kutabumi. Selama ini bila hujan lebat mengguyur wilayah sekitar terendam banjir.

**Baca Juga: [Kampanye di Malingping, Andra Soni Pastikan Cilangkahan Jadi DOB](#)

Aji bilang sudah tiga kali mengadu ke aparaturnya daerah tapi belum ada penanganan. “Hujan kecil pun (banjir). Selama 10 tahun, ada,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Agung Prasetyo, warga sekitar juga

menyampaikan aspirasi langsung ke politikus PDIP tersebut. Ia juga menginginkan adanya pengentasan pengangguran, fasilitasi UMKM.

“Harapan saya, ada perubahan yang signifikan untuk pelayanan semua,” ungkap Agung.

Sementara itu, Irvansyah Asmat menyatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hak dasar yang belum diperoleh. Masalah lainnya seperti kak untuk pendidikan dan untuk jaminan kesehatan, karena masih adanya pelayanan yang berbelit-belit.

“Mereka hanya sederhana, bagaimana mereka bisa mengakses (layanan) kesehatan secara mudah. Maka kami tawarkan, hanya dengan menggunakan KTP. Warga berobat dilayani dan gratis, biayanya ditanggung oleh pemda,” klaim Irvansyah.

Diketahui, di Pilkada Kabupaten Tangerang 2024 ini ada tiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Paslon nomor urut 1 Mad Romli – Irvansyah Asmat. Keduanya disokong oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat serta Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan partai politik nonparlemen yang mendukung Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh.

Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tangerang Maesyah Rasyid – Intan Nurul Hikmah nomor urut 2 disokong oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, NasDem, Golkar.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 menghadirkan pasangan calon dari jalur perseorangan. Calon independen ini adalah Zulkarnain dan Lerru Yudistira. (Yud)

Kampanye di Malingping, Andra Soni Pastikan Cilangkahan Jadi DOB

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Calon Gubernur Provinsi Banten nomor urut 2, Andra Soni kembali berkampanye di wilayah Lebak, pada Minggu, (29/9/2024). Kampanye hari kelimanya ini ia memulai menggelar senam gemoy bersama warga di Lapangan Panji Waringin Desa Sukamanah, Malingping, Lebak.

Dalam kampanyenya, Andra Soni menyampaikan program-program unggulan yang akan dijalankan ketika nanti terpilih menjadi Gubernur Banten. Di antaranya adalah sekolah gratis SMA/SMK dan MA baik negeri maupun swasta.

Selain itu ia juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Banten sebagai provinsi yang maju, adil merata tidak korupsi. Hal itu menjadi pedomannya, bukan hanya sebagai calon Gubernur melainkan sebagai pribadi dari mantan Ketua DPRD Banten itu.

****Baca Juga: [KPU Banten: Ancaman Pidana Terkait Politik Uang Bisa Jerat Siapapun](#)**

“Saya tidak akan korupsi, karena korupsi menyusahkan rakyat.

Bikin jalan rusak, membuat pelayanan rumah sakit buruk, membuat anak-anak susah sekolah. Sekali lagi tidak korupsi adalah solusi kemajuan,” kata Andra.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten ini juga menyampaikan kabar baik kepada warga Malingping. Di mana kata Andra, ada sebanyak 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur Kabupaten/Kota telah disetujui pada pembahasan tingkat I oleh Komisi II DPR dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 25 September 2024 lalu.

Dari 79 RUU tentang Kabupaten/Kota ini di antaranya ada 4 kabupaten baru di wilayah Provinsi Banten, yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Tangerang. Keempat kabupaten baru itu termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan, Lebak.

Upaya pemekaran kabupaten baru itu rupanya ada peranan Politisi Partai Andra Soni, yang sebelumnya pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Banten.

Sebelumnya Andra Soni ikut menginisiasi langkah-langkah teknis bersama DPR dalam rangka mempercepat proses pengesahan RUU Kabupaten/kota yang di dalamnya ada empat daerah di Provinsi Banten.

“Tentu ini menjadi satu keharusan, apalagi untuk wilayah Lebak dan Pandeglang. Ini merupakan komitmen saya bagaimana ke depan masyarakat di Banten Selatan makin bisa mandiri, sehingga pelayanan semakin terakses mudah,” kata Andra.

Andra akan mengawal RUU tersebut hingga disahkan menjadi Undang-undang. Ia meyakini hal itu akan mudah terwujud karena DPR punya komitmen dalam mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Andra Soni sendiri sejak awal mendukung penuh adanya DOB di Banten, khususnya wilayah Banten Selatan, baik Lebak maupun Pandeglang. Andra berharap, seperti Cilangkahan, dan Cibaliung

segera menjadi kabupaten yang mandiri.

DOB dipandang perlu guna memajukan suatu wilayah Banten bagian Selatan yang mempunyai bentang wilayah terbesar di Banten. Ia menyebut, Lebak punya luas sepertiga dari total luas Provinsi Banten. Begitupun dengan Pandeglang luasnya dua kali lipat dari Kabupaten Tangerang.

“DOB ini dipandang perlu sebagai bentuk peran dari Pemerintah Pusat guna memutus kesenjangan antara Banten Selatan dan Utara yang kini terjadi,” kata Andra.

Penyebab kesenjangan kata dia, tak lepas dari pendapatan asli daerah yang rendah. Hal itu tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal menurutnya, pendapatan asli daerah itu dalam rangka kebutuhan biaya pembangunan.

Dikatakannya, saat ini masih terdapat perbedaan antara Banten Selatan dengan Banten Utara. Hal itu dibuktikan dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

“Kita harus adil, sepertiga wilayah Banten itu ada di Lebak dan juga Pandeglang. Hari ini, IPM kita (Banten) terlihat masih tinggi diatas rata-rata nasional. Tapi setelah kita zoom, terlihat perbedaan cukup jauh di Lebak dan Pandeglang,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan oleh kondisi luas wilayah, dan infrastruktur yang masih belum merata baik itu dari segi jalan, juga sarana pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya DOB, maka diharapkan dapat mengikis kesenjangan pembangunan juga pendapatan asli daerah di Banten Selatan.

Salah satu solusinya lanjut Andra, ada keberpihakan APBD Provinsi Banten pada wilayah yang masih tertinggal pembangunannya dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan.

“DOB Cilangkahan ini prosesnya sudah jauh sebelum adanya

moratorium, saya pikir tinggal bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat ke depan. Dan kami dari Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar DOB ini bisa segera dilakukan, karena saya yakin dengan DOB ini maka akan mengikis kesenjangan Banten Selatan,” jelasnya.(Aep)

“Berikutnya DOB terkhusus Cilangkahan juga dapat menjadi bagian dari solusi percepatan pemerataan pembangunan wilayah Banten selatan,” tambah Andra.

Andra juga berharap ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan potensi wilayah Banten Selatan. Ia sendiri punya visi untuk mewujudkan Banten maju, adil merata tidak korupsi.

Untuk itu, Andra memohon doa dan dukungan kepada warga Malingping untuk dipercaya memimpin Provinsi Banten selama lima tahun ke depan melalui kontestasi Pilgub 2024 mendatang.

“Tanggal 27 November kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, saya hadir sebagai calon Gubernur Banten. Saya mohon doanya, untuk nomor 2 menang. Pilpres kita memenangkan nomor 2, Pilgub juga kita memenangkan nomor 2,” pungkasnya. (Red)

Komisi Informasi: Informasi

yang Diminta Masyarakat Wajib Diberikan Badan Publik

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Arya Sandhiyudha mengatakan bahwa semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dari badan publik wajib diberikan, karena itu semua adalah hak mereka.

“Informasi apa pun di Indonesia yang diminta oleh masyarakat harus diberikan sebagai hak oleh pemerintah dan badan publik,” kata Arya di Jakarta, Minggu (29/9/2024), saat memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia 2024.

Menurut dia, pada peringatan Hari Hak Untuk Tahu ini KI mengajak semua badan publik pemerintah dari tingkat desa hingga pusat untuk bersama berkomitmen memberikan hak informasi kepada masyarakat.

****Baca Juga:** [KPU Banten: Ancaman Pidana Terkait Politik Uang Bisa Jerat Siapapun](#)

Arya mengatakan bahwa informasi terkait penyelenggara negara dan badan publik sudah tercantum sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Ia melanjutkan bahwa badan publik berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, karena mereka menggunakan anggaran yang dihasilkan dari pajak dan itu semua diambil dari masyarakat.

“Sebagai yang menyumbang pajak untuk menghidupi ASN, menghidupi program-program badan publik, maka badan publik harus berkomitmen memberikan hak informasi kepada masyarakat,” tuturnya.

Arya menambahkan, ketika badan publik tidak memberikan jawaban informasi yang dibutuhkan dalam kurun waktu 10 hari, maka masyarakat dapat melaporkan ke KI, dan jika setelah dilaporkan belum juga menyampaikan informasi, maka KI akan menyidangkan.

“Komisi Informasi ini tugasnya berada di tengah-tengah untuk menjembatani masyarakat dan badan publik,” katanya dilansir Antra.

Sebelumnya, KI Pusat mengupayakan sebanyak 364 badan publik (BP) di seluruh Indonesia dapat mempermudah akses informasi kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar.

“Saat ini baru 139 badan publik yang sudah informatif,” kata Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Rabu, saat memberi sambutan pada acara peluncuran elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev).

Menurut dia, jumlah BP di Indonesia saat ini mencapai 364 yang terdiri dari kementerian, perusahaan BUMN, perguruan tinggi negeri (PTN), lembaga negara dan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, masih banyak BP

yang belum informatif, bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 200 badan publik.(red)

Miris! Polisi Ungkap Kamatian Warga Kediri Diduga Dibunuh oleh Saudara Sendiri

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur mengusut kematian D, yang terjadi di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri pada Sabtu malam, diduga dilakukan oleh saudaranya sendiri.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri Kota Iptu M

Fathur Rozikin mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kediri tersebut. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui kronologi kejadian.

“Korban berinsial D meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala akibat benda tumpul,” katanya di Kediri, dilansir Antara Minggu (29/9/2024).

**Baca Juga: [BNN Banten Grebekan Pabrik Ekstasi di Kota Serang](#)

Ia menyebut, kasus itu terjadi pada Sabtu (28/9) malam hampir dini hari. Anggota langsung ke lokasi kejadian perkara begitu mendapatkan laporan.

Anggota kemudian memeriksa lokasi dan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan benda tajam melainkan ada pecahan keramik yang diduga dilakukan untuk menganiaya korban hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

“Hasil olah TKP ada pecahan keramik yang diduga untuk menganiaya sehingga meninggal dunia. Luka senjata tajam tidak ada, yang ada luka yang dialami karena benda tumpul di bagian kepala,” kata dia.

Untuk pelaku, kata dia, masih dalam pencarian. Ia dilaporkan kabur sesaat setelah kejadian tersebut.

“Sementara masih pencarian,” kata dia.

Dari informasi yang didapatkan, korban berinisial D dan pelaku berinisial E. Keduanya masih bersaudara yakni kakak beradik. Mereka sebelumnya pesta minum-minuman keras, namun saat itu ada cekcok yang belum diketahui permasalahannya sehingga terjadi insiden tersebut.

Polisi juga sudah mensterilkan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang untuk masuk.

Untuk jenazah dirawat terlebih dahulu oleh petugas medis di RS Bhayangkara Kediri, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keluarga juga menunggu jenazah diizinkan untuk dibawa pulang dan segera dimakamkan.

Sejumlah warga juga masih penasaran dengan datang ke lokasi kejadian. Mereka ingin melihat langsung lokasi yang sudah diberi garis polisi tersebut. Namun, mereka tidak diperbolehkan masuk, karena sudah steril.(red)

BNN Banten Grebekan Pabrik Ekstasi di Kota Serang

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten membenarkan adanya penggrebekan pabrik penghasil ekstasi pada sebuah perumahan di kawasan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

“Iya, nanti ada release resminya dari BNN RI,” kata Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Banten Kombes Pol Irwan Andy Purnawan kepada ANTARA di Serang, dilansir Antara Minggu (29/9/2024).

Irwan mengatakan rilis resmi mengenai penggerebekan tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat, bersama dengan penyidik BNN RI.

**Baca Juga:[Kejagung Lelang Aset Rampasan Terpidana Anang Diantoko Bos Robot Trading Evotrade](#)

Namun, ia belum mengkonfirmasi hasil tangkapan maupun tersangka dari penggerebekan pabrik ekstasi tersebut, karena data bersangkutan dari penyidik BNN RI.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun awak media, penggerebekan rumah produksi tablet ekstasi terjadi pada Sabtu (28/9) sore.

Dalam penggerebekan itu, BNN mengamankan barang bukti sebanyak dua ton tablet ekstasi, termasuk alat pembuat pil ekstasi. BNN juga meringkus satu pelaku utama dan 10 orang tersangka.(red)

KPU Banten: Ancaman Pidana Terkait Politik Uang Bisa Jerat Siapapun

written by Kabar 6 | 29 September 2024



Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengingatkan bahwa ancaman pidana pada Pilkada 2024 terkait politik uang kini bisa menjerat siapa saja, tidak hanya pada tim kampanye yang terbukti melakukan.

Komisioner KPU Banten Aas Satibi mengatakan pada pemilu lalu, subjek hukumnya hanya peserta tim kampanye yang telah dikunci dan didaftarkan.

Sementara pada pilkada, subyek hukum secara undang-undang adalah setiap orang.

****Baca Juga:** [Laporan Awal Dana Kampanye Cabup dan Cawabup Lebak: Hasbi – Amir Rp50 Juta, Dede – Virnie Rp5 Juta, Sanuji – Fajar Rp61 Juta](#)

“Jadi siapapun yang mempengaruhi dengan janji dengan memberikan sesuatu untuk memilih atau tidak memilih, atau untuk memilih dengan cara tertentu, sehingga suaranya tidak sah dan yang lain sebagainya itu itu bisa dipidana dalam kampanye,” ujar Aas dilansir Antara (29/9/2024).

Selain itu Aas mengatakan kampanye yang berkaitan dengan hadiah, telah diatur dengan barang satuan maksimal seharga Rp1

juta.

KPU Banten telah mengatur perihal metode kampanye calon Gubernur-Wakil Gubernur melalui Peraturan KPU Banten nomor 132/2024.

Aturan tersebut dibagikan dalam sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024 di Serang, Sabtu.

Dalam keputusan tersebut diatur fasilitasi KPU Banten bahan kampanye pasangan calon, jumlah daftar pemilih tetap (DPT), jumlah tempat pemungutan suara, serta lini masa dan aturan kampanye yang tidak melanggar perundang-undangan.

Keputusan itu juga mengatur mengenai teknis pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, rapat terbuka, dan dialog. KPU Provinsi Banten juga memfasilitasi debat antarpasangan calon.

KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur dan telah mengundi nomor urut pasangan peserta Pilkada Banten.

Hasil pengundian nomor urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dilakukan KPU Provinsi Banten, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapatkan nomor urut satu dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah nomor urut dua.(red)